



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 276 /Kept./403.013/2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara dan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya;
 - b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan
 - c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), biaya umum (*overhead*), pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Program dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 276 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	HARGA SATUAN TERTINGGI	SATUAN
1	2	3	
1.	Pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya		
	a. Tidak Sederhana	6.510.000	Rupiah/m ² bangunan
	b. Sederhana	5.380.000	Rupiah/m ² bangunan
2.	Pembangunan Rumah Negara		
	a. Tipe A	5.980.000	Rupiah/m ² bangunan
	b. Tipe B	5.860.000	Rupiah/m ² bangunan
	c. Tipe C, D, E	5.060.000	Rupiah/m ² bangunan
3.	Pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya		
	a. pagar depan	2.660.000	Rupiah/ m ¹ bangunan
	b. pagar belakang	2.230.000	Rupiah/ m ¹ bangunan
	c. pagar samping	2.150.000	Rupiah/ m ¹ bangunan
4.	Pembangunan pagar Rumah Negara		
	a. pagar depan	2.450.000	Rupiah/ m ¹ bangunan
	b. pagar belakang	1.440.000	Rupiah/ m ¹ bangunan
	c. pagar samping	1.360.000	Rupiah/ m ¹ bangunan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO